



BAB II PERENCANAAN KERJA

A. Gambaran Umum

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang Polhukam) dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

B. Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Pada awal tahun 2019, Deputi Bidang Polhukam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Polhukam, rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

**SASARAN: TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS
DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Pemilihan sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam yakni berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **3 (tiga) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**. Empat kegiatan dimaksud juga memiliki keterkaitan yang sangat erat



dengan masing-masing Asisten Deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang Polhukam.

Adapun ikhtisar kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Polhukam pada tahun 2019 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1
Sasaran, Program dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2019**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Target Anggaran dan Kegiatan
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2019**

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Politik Dalam Negeri (Kode Kegiatan: 5015)	Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (Kode Kegiatan: 5016)	Rp.2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional (Kode Kegiatan: 5018)	Rp.1.500.218.000,- (satu milyar lima ratus juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika (Kode Kegiatan: 5017)	Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah)



KEGIATAN	ANGGARAN
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG POLHUKAM TAHUN 2019	Rp.6.525.218.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Target dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Polhukam Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2019. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019, Deputi Bidang Polhukam tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa semua rekomendasi di bidang polhukam harus berkualitas dalam arti disetujui oleh Sekretaris Kabinet.



C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Polhukam pada tahun 2019 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Polhukam Tahun 2019, maka IKU yang digunakan berubah menjadi sebagai berikut:

**Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Deputy Bidang Polhukam Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris KabinetPersentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris KabinetPersentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet